

Ada Pawai Budaya, Jalur Stadion Pakansari Bogor Buka Tutup

CIBINONG (IM)- Kegiatan helaran atau pawai budaya dalam rangkaian Bogor Fest 2023 akan digelar di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu. Polisi menyiapkan rekayasa lalu lintas untuk meminimalisir kemacetan.

Kasat Lantas Polres Bogor, AKP Dicky Anggi Pranata mengatakan, rekayasa lalu lintas yang disiapkan adalah buka tutup dan pengalihan arus. Rekayasa lalu lintas akan digelar mulai pagi hingga siang hari.

"Pukul 06.00-12.00 WIB, di jalur Stadion Pakansari Cibinong akan dilaksanakan rekayasa lalu lintas buka tutup dan pengalihan arus dikarenakan ada kegiatan helaran," kata Dicky, Jumat (25/8).

Dicky mengimbau kepada masyarakat yang tidak berkepentingan untuk se-

mentara tidak melintas di Stadion Pakansari, untuk menghindari kepadatan lalu lintas. "Untuk menghindari kepadatan arus lalu lintas, agar tidak melintas di jalur Stadion Pakansari," jelasnya.

Sementara itu, KBO Satlantas Polres Bogor, Iptu Ardian Novianto mengatakan, akses masuk menuju area Stadion Pakansari saat helaran hanya lewat Cikempong.

"Kita siapkan titik pengalihan hanya di alternatif Sentul, dan akses masuk ke Pakansari lewat Cikempong," kata Ardian.

Dia mengatakan hanya akses lingkar luar Stadion Pakansari yang bisa digunakan untuk kendaraan melintas. Rekayasa lalu lintas akan dilakukan secara situasional. ● **pra**

Ridwan Kamil Berharap Segera Lantik Iwan Setiawan Jadi Bupati Definitif

BOGOR (IM)- Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil berharap segera bisa melantik Iwan Setiawan sebagai Bupati Bogor definitif menggantikan Ade Yasin yang diberhentikan.

Ridwan Kamil mengaku sudah menerima Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 100.2.1.3.3178 Tahun 2023, DPRD Kabupaten Bogor sudah memproses pengesahan pemberhentian Bupati Bogor Ade Yasin dan menunjuk Iwan Setiawan sebagai Bupati Bogor di sisa akhir periode masa jabatan 2018-2023 dan juga surat Plt Bupati Bogor.

"Surat permohonan pelantikan Iwan Setiawan sebagai Bupati Bogor definitif sudah saya kirimkan ke Mendagri jika sudah dibalas sebelum tang-

gal 5 September (berakhirnya masa jabatan), maka ia akan saya lantik di Gedung Sate kota Bandung," singkat Ridwan Kamil kepada wartawan.

Dari informasi yang dihimpun, SK Mendagri Tito Karnavian itu terbit pasca inkrachnya putusan pengadilan mantan Bupati Bogor Ade Yasin, yang tertuang dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 834 K/Pid.sus/2023 Tanggal 7 Maret 2023 yang menolak permohonan Kasasi dari pemohon.

Ridwan Kamil sebelumnya dengan surat nomor 5907/OD.03.02/Pemoda/Pemprov Jawa Barat Tanggal 2023 juga telah mengusulkan pemberhentian Ade Yasin dari jabatannya sebagai Bupati Bogor periode 2018-2023. ● **pra**



IDN/ANTARA

KIRAB KEBANGSAAN MERAH PUTIH DI TASIKMALAYA

Peserta mengikuti kirab kebangsaan merah putih di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Jumat (25/8). Kirab merah putih yang diikuti dari masyarakat, tokoh lintas agama, TNI dan Polri se-Priangan Timur itu, bertujuan untuk menjaga persatuan NKRI dan menumbuhkan nasionalisme dan sikap toleransi antarberagama.

Pejabat BUMD di Cianjur yang Pamer Kekayaan Punya 'Bank Emok'

CIANJUR (IM)- Seorang pejabat di badan usaha milik daerah (BUMD) Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, yang pamer kekayaan ternyata memiliki "bank emok".

Pejabat perempuan yang pamer kekayaan dan memiliki "bank emok" tersebut, adalah IM. IM sebelumnya menjabat sebagai Kepala Cabang Perumdam Tirta Mukti Cianjur Kota, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.

Berdasarkan informasi dari rekan-rekannya di tempat kerja, terungkap bahwa pejabat yang pamer kekayaan tersebut memiliki usaha sampingan yang cukup menguntungkan. Usaha sampingan tersebut adalah memberikan pinjaman uang dengan bunga tinggi atau yang disebut sebagai "bank emok".

Seorang rekan kerja IM yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan, usaha sampingan "bank emok" dengan meminjamkan uang disertai bunga tinggi ini sudah dilakukan oleh IM sejak lama. Bahkan saat IM masih menjadi pegawai biasa di Perumdam Tirta Mukti Cianjur.

Tidak hanya pegawai biasa, pejabat utama seperti direktur utama dan direktur umum juga pernah meminjam uang atau menggunakan

jasa pinjaman yang ditawarkan oleh IM.

"Kenal dengan baik oleh Bu Imas, saya pun pernah meminta bantuan pinjaman uang darinya, dan hal ini juga umum dilakukan oleh seluruh karyawan PDAM. Kemungkinan besar di luar PDAM, Bu Imas juga memberikan pinjaman uang," ungkapnya, Jumat (25/8).

Akibat dari aksi yang terekam dalam media sosial, jajaran Direksi Perumdam Tirta Mukti Cianjur terpaksa mencopot IM dari jabatannya sebagai Kepala Cabang Perumdam Tirta Mukti Cianjur Kota, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, dan menaruhkannya kembali ke kantor pusat.

Achmad Akbar, Direktur Umum Perumdam Tirta Mukti Kabupaten Cianjur, menjelaskan, tindakan tersebut sesuai dengan kebijakan dan IM dicopot dari jabatannya. Pengganti IM akan diisi oleh pelaksana tugas (plt). "Meskipun dicopot dari jabatannya, saya ingin pastikan bahwa tidak ada sanksi berupa penurunan pangkat bagi yang bersangkutan, karena dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan indikasi pelanggaran terkait sumber kekayaan yang dimaksud," tambahnya. ● **pra**

8 | Nusantara



IDN/ANTARA

KUNJUNGAN MENPORA DI BANDUNG

Menteri Pemuda dan Olahraga Ario Bimo Nandito Ariotedjo (tengah) meninjau kereta peti sabun di Museum Geologi, Bandung, Jawa Barat, Jumat (25/8). Dalam kunjungan kerjanya di Bandung, Menpora berkesempatan untuk meninjau persiapan lomba kereta peti sabun serta berbincang dengan peserta lomba dari siswa SMK.

Pemkab Bogor Sanksi Tegas Industri yang Cemari Sungai Cileungsi

Di lapangan, kami menemukan ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan yang berada di dekat aliran Sungai Cileungsi. Yang pertama, ada saluran pembuangan bypass dari inlet ke Sungai Cileungsi. Kemudian, ada rembesan-rembesan air limbah yang tidak terkontrol sehingga mencemari aliran, tegas Kepala Bidang Penegakan Hukum dan B3 DLH Kabupaten Bogor, Gantara Lenggana.

CIBINONG (IM)- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) melakukan penegakan hukum terhadap salah satu perusahaan di Wilayah Gunung Putri. Perusahaan tersebut terbukti mencemari Sub Daerah Aliran Sungai (DAS) Cileungsi, dengan membuang limbah dan mengelola limbah tidak sesuai dengan aturan yang ada.

Kepala Bidang Penegakan

Hukum dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) DLH Kabupaten Bogor, Gantara Lenggana, mengatakan perusahaan ini disinyalir membuang limbah, serta mengelola limbah tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Sehingga mencemari Sub DAS Cileungsi.

"Di lapangan, kami temukan ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan yang berada di

dekat aliran Sungai Cileungsi. Yang pertama, ada saluran pembuangan bypass dari inlet ke Sungai Cileungsi. Kemudian, ada rembesan-rembesan air limbah yang tidak terkontrol sehingga mencemari aliran sungai Cileungsi yang selama ini sedang kita lakukan penanganan dari hulu sampai dengan hilir," tegas Gantara, kemarin.

Atas pelanggaran tersebut, lanjut Gantara, DLH memasing garis Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH Line). Artinya menutup sementara lokasi instalasi pengolahan air limbah perusahaan tersebut. Kedua, menutup permanen saluran bypass atau secara langsung ke Sungai Cileungsi. Serta melakukan pemasangan papan larangan.

"Maka konsekuensinya bagi perusahaan tersebut harus segera melakukan perbaikan dan pemulihan terhadap media yang terkontaminasi limbah. Perusahaan juga harus segera membersihkan saluran-saluran yang telah terkontaminasi limbah di sekitar Sub DAS Cileungsi

yang berdekatan dengan perusahaan tersebut," ujarnya.

Selanjutnya, kata Gantara, selama proses perbaikan dan pemulihan terhadap media yang terkontaminasi limbah dimaksud, perusahaan harus melaksanakan kerja sama dengan pihak lain atau pengelola (pengumpul/pengangkut/pemanfaat/pengolah/penimbun) limbah B3 berizin, agar tidak kembali mencemari Sub DAS Cileungsi. Perusahaan diberikan batas waktu dan terus diawasi sesuai ketentuan yang berlaku.

"Jika tidak dilakukan sesuai waktu yang ditentukan dan terbukti tidak mematuhi aturan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perusahaan akan berhadapan dengan hukum. Nantinya juga ada langkah-langkah lanjutan, seperti nanti bisa ke arah pembekuan dan pencabutan persetujuan ling-

kungan bahkan Perizinan Berusaha," tegasnya.

Ia mengungkapkan, dengan langkah ini menunjukkan bahwa Pemkab Bogor tidak tinggal diam. Kegiatan pengawasan melekat ataupun pengawasan spesifik kepada perusahaan yang disinyalir lalai dalam hal pengendalian pencemaran air dan udara, serta pengelolaan LB3 tidak berhenti hari ini saja. Pemkab Bogor menegaskan, akan terus melakukan kegiatan serupa.

"Namun kami tidak mungkin melakukannya sendirian, dinas-dinas terkait, masyarakat dan seluruh stakeholder harus bersama-sama bergandengan tangan, mendukung optimalisasi penanganan pencemaran lingkungan yang ada di DAS Cileungsi," ujarnya.

Ia pun mengimbau kepada seluruh pelaku usaha untuk menaati aturan-aturan terkait dengan pengendalian pencemaran air dan udara, serta pengelolaan limbah B3, agar sesuai dengan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. ● **gio**

DPKPP Kabupaten Bogor, Hadirkan Hunian Idaman dengan Biaya Murah

BOGOR (IM) -Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor pada saat pembukaan Bogor Fest menghadirkan hunian idaman dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat kalangan menengah ke bawah berbasis teknologi Rumah Instan Sederhana Sehat.

Memiliki Rumah idaman yang nyaman aman dan sehat pastinya jadi keinginan semua orang. Keinginan setiap orang yang ingin memiliki rumah nyaman dan aman tersebut kini disuguhkan oleh DPKPP Kabupaten Bogor dalam acara Bogor Fest Tahun 2023 di area Stadion Pakansari, Cibinong mulai 24 hingga 27 Agustus 2023.

Stand DPKPP Kabupaten Bogor dalam kegiatan yang dilaksanakan di area Stadion Pakansari tersebut memiliki perbedaan tersendiri dalam Bogor Fest yakni menghadir-

kan hunian instan dan nyaman yang diperkenalkan pihak DP-

KPP pada setiap pengunjung. Hal itu disampaikan Kepala DPKPP Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika kepada wartawan pada stand acara Bogor fest 2023. Pihaknya dalam kesempatan itu mengangkat tema membangun rumah itu mudah.

"Kami lebih mempromosikan tupoksi DPKPP kepada masyarakat yang memang membutuhkan rumah. Sasaran kami itu untuk masyarakat kalangan menengah kebawah," ujarnya Kamis (24/8).

Lebih lanjut Ajat menjelaskan, pihaknya juga menyuarakan kawasan hunian yang sehat dan tak asal bangun untuk di wilayah Bumi Tegar Beriman. "Kawasan-kawasan permukiman yang kumuh juga jadi sorotan kami, harus menyisir. Target kami memperkenalkan itu, membangun jangan asal-asalan, ikuti aturan

main dan teknologinya, kami juga gak was-was," tandasnya.

Ajat menambahkan, pihaknya memperkenalkan hunian yang nyaman namun berbiaya terjangkau untuk masyarakat khususnya Kabupaten Bogor.

"Bahwa sebenarnya ada rumah yang instan, cukup aman, cukup murah dan bisa dibangun sendiri oleh pemiliknya, apabila mematuhi aturan teknis yang ada di kami," katanya.

Ia menambahkan, pembangunan hunian yang ditampilkan dalam Bogor Fest tersebut hanya membutuhkan biaya puluhan juta dengan waktu yang tak lama.

"Ini juga hunian yang Huntap. Mereka buat sendiri, dengan 62 juta rupiah sudah terbangun kemudian waktunya juga cepat. Artinya dengan membangun rumah teknologi Risha ini mudah," ungkapnya. ● **jay/gio**



Ema Dorong Pemprov Jabar Percepat Operasional TPA Legok Nangka

BANDUNG (IM)- Hingga kini titik api masih terlihat di TPA Sarimukti, imbas kebakaran Senin (21/8). Akibatnya, Pemerintah Jawa Barat melalui DLH Jabar memutuskan untuk menutup akses masuk TPA Sarimukti untuk sementara.

Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota Bandung Ema Sumarna mengatakan, sebagai salah satu dari empat wilayah yang mengirim sampah ke Sarimukti, keputusan penutupan sementara ini dapat memicu terjadinya penumpukan sampah di wilayah-wilayah. Untuk menghindari hal tersebut, Ema mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mempercepat pengoperasian TPA Legok Nangka.

"Kita mendorong mulai pengoperasionalan TPA Legok Nangka, itu ada beberapa area yang dapat dimanfaatkan untuk menampung sampah sebagai TPA," kata Ema dalam keterangan yang diterima, kemarin.

Ema menyebut, pengoperasian TPA Legok Nangka dapat menjadi salah satu solusi penanganan sampah di Kota Bandung maupun wilayah-wilayah lain yang mengandalkan Sarimukti sebagai tempat akhir pembuangan sampah. Dia juga menegaskan, Kota Bandung tidak akan bermasalah jika ada pengalihan pengangkutan sampah dari TPA Sarimukti ke TPA Legok Nangka.

"Kita punya kemampuan untuk mengangkut sampah ke Legok Nangka, sama jaraknya dengan ke TPA Sarimukti," katanya.

Alternatif lain yang tengah didorong Pemkot Bandung adalah dengan

menggenjot penambahan Kawasan Bebas Sampah (KBS) di seluruh RW. Ema mengatakan, saat ini Kota Bandung telah memiliki 234 RW yang berstatus KBS.

Jumlah ini, masih tergolong kecil jika dibandingkan total RW di Kota Bandung yang berjumlah 1.500 RW. Meski begitu, Ema menekankan Pemkot Bandung akan meningkatkan upaya untuk memperbanyak KBS dan menjadikan Kota Bandung sebagai zero waste city.

"Alhamdulillah ada progres dari 154 RW sekarang sudah diatas 234 RW KBS. Ini terus kita dorong dan galakan agar Bandung menjadi zero waste city, ini harus kita lakukan secara masif," ujarnya.

Sebelumnya, Kepala UPTD Pengelolaan Sampah TPA/TPST Regional Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Barat (Jabar) Arief Perdana mengungkapkan, penutupan sementara TPA Sarimukti untuk aktivitas pembuangan sampah dilakukan karena ada keterbatasan jarak pandang di lokasi imbas asap kebakaran. Kondisi tersebut dinilai bisa membahayakan sopir truk pengangkut sampah.

Selain itu, kata dia, api mendekati area pembuangan, sehingga dikhawatirkan bisa menyambar truk sampah. Menurut Arief, jika kebakaran sudah bisa dipadamkan atau kondisi dinilai tidak membahayakan, pembuangan sampah ke TPA Sarimukti akan dibuka kembali.

"Jadi, sementara dihentikan, ditutup dulu," katanya. ● **pra**